

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan  
Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.)

**Oleh**

**AMINAH NUR HABIBAH**

**NPM : 1660102056**

**Program Studi Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan  
Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.)

**Oleh**

**AMINAH NUR HABIBAH**

**NPM : 1660102056**

**Program Studi Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Ruslan AbdulGhafur N, M.S.I**

**Pembimbing II : Dr. Erike Anggraini, S.E., M.E.Sy**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## **PERNYATAAN ORISINIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aminah Nur Habibah

NPM : 1660102056

Judul Tesis : **Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan  
Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok  
Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Aminah Nur Habibah

1660102056

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, intervensi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi hal tersebut. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011. Kecamatan Ketapang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah pendapatan rata-rata masyarakat Kecamatan Ketapang sebelum mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatakan rendah yaitu pendapatan < Rp.500.000 mencapai 60.9%. Dengan pendapatan yang rendah maka akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti halnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu untuk menanggulangi keluarga miskin yang ada pada Kecamatan Ketapang pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan dengan harapan mampu membantu masyarakat menanggulangi pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan serta kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan?, Kedua Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam maka dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Ketapang berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah. Peningkatan yang terjadi pada aspek pendapatan masyarakat dalam kategori <500.000 sebelum mendapat bantuan sebesar 60.9% sesudahnya sebesar 28.7%, dalam kategori 500.000-750.000 sebelum mendapat bantuan sebesar 30.2% sesudahnya sebesar 55.8%, dalam kategori >750.000 sebelum mendapat bantuan sebesar 8.9% sesudahnya sebesar 15.5%. Kemudian peningkatan yang terjadi dalam aspek pendidikan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PKH dengan kategori bersekolah sebesar 29.2%. Kondisi pendidikan belum sekolah mengalami penurunan jumlah anak-anak yang belum sekolah sebesar 11.2%. Kondisi pendidikan anak-anak putus sekolah juga mengalami penurunan pada persentase angka 28.1%. Kemudian kondisi pendidikan anak-anak yang tidak sekolah berada pada persentase 23.6%.

Kegiatan yang dilakukan Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan positif dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan *Ad-daruriyyah*, kebutuhan *Al-hajjiyyah*, serta kebutuhan *At-tahsiniyyah* dengan tidak melanggar aturan dan syariat Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

*Alamat : Jl. Z.A Pagar Alam. Labuhan Ratu. Tlp, (0721) 5617070 Bandar Lampung*

---

**PERSETUJUAN**

Judul Tesis : **Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan  
Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok  
Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : Aminah Nur Habibah  
NPM : 1660102056  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

**MENYETUJUI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Terutup pada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, November 2018

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Ruslan Abdul Ghafur N, M.S.I**

NIP. 19800801 2 003121 001

**Dr. Erike Anggraini, S.E., M.E.Sy**

NIP. 198208082011012 009

**Mengetahui**

**Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., CA**

NIP. 19700926200801 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

*Alamat : Jl. Z.A Pagar Alam. Labuhan Ratu. Tlp, (0721) 5617070 Bandar Lampung*

---

**PERSETUJUAN**

Tesis yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)”, ditulis oleh : AMINAH NUR HABIBAH, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1660102056 Telah diujikan dalam Ujian Tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag (.....)

**Sekretaris** : Mardhiyah Hayati, S. P., M.S. I (.....)

**Penguji I** : Prof. Dr. M. Nasor, M. Si (.....)

**Penguji II** : Dr. Erike Anggraeni, S.E., M.E. Sy (.....)

Tanggal Lulus Ujian Tertutup : 20 Desember 2018





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**Alamat : Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Tlp. (0721) 5617070 Bandar Lampung**

**PERSETUJUAN**

Tesis yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)”**, ditulis oleh : **AMINAH NUR HABIBAH**, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1660102056 Telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag**

**Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S. P., M.S. I**

**Penguji I : Prof. Dr. M. Nasor, M. Si**

**Penguji II : Dr. Erike Anggraeni, S.E., M.E. Sy**

**Tanggal Lulus Ujian Terbuka : 2 Juli 2020**

**Mengetahui**

**Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag**  
**NIP. 1960010200198803 1 005**



## MOTTO

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (البقرة : ٢٦)

Artinya : *"dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali"*  
(Al-Baqarah : 126)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah. Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas rahmat dan Ridho-nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini, penulisan tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda saya tercinta Muhammad Wiji dan Ratiyah, sebagai tanda bakti dan rasa hormat dan rasa terima kasih kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, cinta kasih yang tiada terhingga, dan selalu mendoakanku serta menasehatiku agar menjadi pribadi yang lebih baik, Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia.
2. Kakak ku tersayang Ahmad Albar Noor, Aziz Abdullah, dan Anas Malik M.E.,Sy serta adik ku tercinta Siti Muslimah Azzahra yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada ku agar selalu bersemangat dalam segala hal.
3. Almamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik yang mampu berfikir untuk lebih maju.
4. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2016 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan tesis ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Aminah Nur Habibah di lahirkan di Pematang Pasir, pada tanggal 07 Mei 1992, Putra Ke Empat dari Lima bersaudara dari pasangan Muhammad Wiji dan Ratiyah.

1. Pendidikan dimulai dari MI Nurul Ma'arif Pematang Pasir pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2004
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Muhajirin, selesai pada tahun 2007.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Islam Ma'arif 7 Pematang Pasir, selesai pada tahun 2010.
4. Pendidikan Strata 1 di IAIN Raden Intan Lampung Jurusan Ekonomi Islam, selesai pada tahun 2014.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta dorongan dari orang tua penulis, selanjutnya pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Lampung (IAIN) yang pada tahun 2016 sudah bertransformasi menjadi UIN Raden Intan Lampung mengambil jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi pada Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2019

Aminah Nur Habibah

NPM: 1660102056

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, kesehatan, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan tesis yang berjudul: Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi: Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Tesis ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Magister Ekonomi Syariah (M.E.Sy). Dalam menulis tesis ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk itu mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah seputar kegiatan perkuliahan.

3. Dr. Ruslan Abdul Ghofur Noor M.S.I selaku Pembimbing I dan Dr. Erike Anggraini S.E., M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung dan jajaran karyawan/pegawai lainnya yang telah meluangkan waktunya dan kesediannya untuk penelitian tesis ini.
6. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama teman-teman seperjuangan tahun angkatan 2016 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang ekonomi Islam.

Bandar Lampung, Januari 2019

**Aminah Nur Habibah**

NPM: 1660102056



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN ORISINIL .....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP.....	vi
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiiiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Berfikir .....	11

## BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Konsep Kebijakan Publik Dalam Ekonomi Islam .....	14
1. Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.....	14
2. Tujuan Kebijakan Fiskal .....	16
3. Mekanisme Kebijakan Fiskal .....	18
B. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH).....	21

1. Program Keluarga Harapan .....	21
2. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	22
3. Aturan Kebijakan dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan .....	23
4. Penerima Program Keluarga Harapan .....	24
5. Kelembagaan Program Keluarga Harapan .....	25
6. Kegiatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .....	27
7. Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) .....	28
C. Pemberdayaan Masyarakat .....	30
1. Pemberdayaan Masyarakat .....	31
2. Pemberdayaan Dalam Ekonomi Islam .....	34
D. Kesejahteraan Masyarakat .....	39
1. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum .....	39
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	39
3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam .....	44
E. Penelitian Terdahulu .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian dan Sifat Penelitian .....	52
B. Subyek Penelitian .....	52
C. Sumber Data .....	53
D. Metode Pengumpulan Data .....	54
E. Sampel dan Teknik <i>Sampling</i> .....	55
F. Metode Pengolahan Data .....	56
G. Metode Analisis Data .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian .....	58
1. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ketapang .....	59

2. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)	
Kecamatan Ketapang .....	61
3. Data Hasil Wawancara .....	69
B. Temuan Penelitian .....	84
1. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan	
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung	
Selatan .....	84
2. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tinjau Dari	
Perspektif Ekonomi Islam .....	109

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	140
B. Rekomendasi .....	141

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia .....	4
Tabel 1.2	Nama Kelompok PKH .....	7
Tabel 1.3	Pendapatan Rata-Rata Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Berdasarkan Tingkat Pendapatan .....	8
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk di Kecamatan Ketapang Berdasarkan Umur Tahun 2017.....	59
Tabel 4.2	Jumlah Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Kecamatan Ketapang.....	59
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	60
Tabel 4.4	Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Tahun 2016-2018 .....	63
Tabel 4.5	Kelompok KUBE di Kecamatan Ketapang.....	65
Tabel 4.6	Data Lapangan Pekerjaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menjadi Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang.....	66
Tabel 4.7	Pendapatan Rata-rata Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Berdasarkan Tingkat Pendapatan .....	67
Tabel 4.8	Data Pendidikan Anak Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang.....	68
Tabel 4.9	Pemenuhan Syarat Kepesertaan PKH.....	94
Tabel 4.10	Jumlah Kelompok PKH di Kecamatan Ketapang.....	95
Tabel 4.11	Indeks dan Komponen Bantuan PKH .....	97
Tabel 4.12	Persentase Pendapatan Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang .....	98
Tabel 4.13	Persentase Data Pendidikan Anak Anggota Penerima	



	Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang .....	99
Tabel 4.14	Data Jenis Usaha Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang .....	101
Tabel 4.15	Jumlah Persentase Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Tahun 2016-2018 .....	113
Tabel 4.16	Persentase Data Pendidikan Anak Sebelum dan Sesudah Masyarakat Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang .....	132

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Sistem Pelaksanaan Kegiatan PKH.....	21
Gambar 2.2 Skema Penetapan Bantuan Sosial KUBE PKH.....	29
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Manajemen UPPKH Kecamatan Ketapang .....	81

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Masyarakat Penerima  
Bantuan PKH.

LAMPIRAN 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pendamping Kecamatan  
Ketapang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, dan bersifat multidimensi. Sebagaimana pendapat Wrihatnolo yang menyatakan bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berimplikasi terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah Negara.<sup>1</sup>

Kemiskinan telah membuat Jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index* (HDI).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 18.

<sup>2</sup> Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 53.



Setiap Negara pasti Memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, salah satu diantaranya adalah bidang sosial ekonomi seperti masalah kemiskinan. Masyarakat miskin tidak cukup mampu dalam menghadapi perkembangan zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita Negara.<sup>3</sup> Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pada pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (*klaster*) kebijakan yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dyah Ayu Virgoreta dkk, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No 12, hlm. 1-6.

<sup>4</sup> UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Parkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

<sup>5</sup> Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), hlm. 8.

1. Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kedua, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Karakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat program adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri.
3. Ketiga adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristik kebijakan ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan manajemen usaha. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun ini dinilai masih cukup tinggi jumlah penduduk miskin, berikut ini adalah angka kemiskinan yang ada di Indonesiayaitu :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah penduduk Miskin Di Indonesia**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
2013	10.33	28.07	28.07	8.39	14.32	11.37
2014	10.51	28.28	28.28	8.34	14.17	11.25
2015	10.65	28.5	28.59	8.29	14.31	11.22
2016	10.34	28.01	28.01	7.79	14.11	10.86
2017	10.67	27.77	27.77	7.72	13.93	10.70

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menggambarkan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar

2,4%, dari data tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan program apakah yang mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk Indonesia.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.”<sup>6</sup>

Dalam Al-qur'an dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُرُ  
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ  
سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ

Artinya : “tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya, Allah SWT ingin memberitahu kita tentang siapakah yang dimaksud sebagai pendusta agama. Menurut Muhammad Abduh itulah orang yang menghardik anak yatim yaitu yang

---

<sup>6</sup> Kementrian Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,(On-line) tersedia di <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf> (diakses, 27 Maret 2018 )

mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-ucapan keras ketika ia datang meminta sesuatu yang diperlukan. Sematamata karena meremehkan kondisinya yang lemah dan tiadanya orang tua yang mampu membela dan memenuhi kebutuhannya, dan juga tedorong oleh kesombongannya karena menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia.<sup>7</sup>

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya namun gambaran/fakta tentang kemiskinan yang ada berbeda-beda. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang ataupun jasa, maka –mereka menganggap–usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan. Di AS atau di negara-negara Eropa Barat, seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sudah dianggap miskin. Pada saat yang sama, di Irak, Sudan, Bangladesh misalnya, seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, tidak dikelompokkan dalam kategori fakir/miskin. Perbedaan-perbedaan ini–meski fakta tentang kemiskinan itu sama saja di mana pun akan mempengaruhi mekanisme dan cara-cara pemecahan masalah kemiskinan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz 'Ammah)*, diterj. Oleh Muhammad Bagir, *Tafsir Juz 'Ammah Muhammad Abduh*, (Cet. V; Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 331.

<sup>8</sup> Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 24.

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS cenderung menurun untuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang diikuti dengan peningkatan garis kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya, seperti jaringan pengaman sosial, Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Aseskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Masyarakat (PKH).<sup>9</sup>

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi hal tersebut. Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2007.<sup>10</sup> Implementasi PKH di Provinsi Lampung dilaksanakan sejak November 2010 pada propinsi Lampung. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011. Kecamatan Ketapang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Selatan. Berikut ini adalah data yang menunjukkan mengapa

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

pemerintah melayangkan bantuannya kepada masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :

**Tabel 1. 2**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)</b>
2015	157.71	319.448
2016	158.38	346.457
2017	150.11	360.595

*Sumber : Data Primer Badan Pusat Statistik Diolah tahun 2018*

Angka di atas berdasarkan dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Ketapang sejak tahun 2015 hingga 2017 berada pada angka 150 ribu penduduk dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Jika berdasarkan pada garis kemiskinan maka berada pada angka 300 rupiah, namun dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Tabel 1.3**  
**Pendapatan Rata-rata Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

<b>No</b>	<b>Jumlah Penghasilan (Rp/bln)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	
		<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
1	< 500.000	1.711	806
2	500.000-750.000	850	1.569
3	>750.000	249	435
<b>Jumlah</b>		<b>2.810</b>	<b>2.810</b>

*Sumber : Data Primer Diolah UPPKH Kec. Ketapang Tahun 2018*

Berdasarkan data diatas, jumlah pendapatan rata-rata masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sebelum mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatakan rendah. Dengan pendapatan yang rendah maka akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti halnya tingkat pendidikan dan kesehatan. oleh sebab itu untuk

menanggulangi keluarga miskin yang ada pada Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan dengan harapan mampu membantu masyarakat menanggulangi pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan serta kesehatan. Berikut ini adalah tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat Kecamatan Ketapang, yaitu :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase
1	Tidak Sekolah	18.182	43,93%
2	Sekolah Dasar	10.139	24,50%
3	SLTP	8.320	20,10%
4	SLTA	4.218	9,97%
5	Akademi D1, D2, D3	345	0,83%
6	Strata 1 (Sarjana)	272	0,66%
Jumlah		41,386	99,99%

*Sumber: Kantor Kecamatan Ketapang Tahun 2018*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Ketapang masih sangat rendah, komposisi penduduk dengan tingkat pendidikan yang tidak bersekolah mencapai 43,93%. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema persoalan, maka dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas maka subfokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan Sebelum dan sesudah dalam meningkatkan Kesejahteraan ekonomi keluarga di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
2. Sistem Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan ekonomi keluarga di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam ?



#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Hasil Penelitian**

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk menemukan bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
  - b. Menemukan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :
  - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama dalam faktor-faktor implementasi program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini.
  - b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder bagi para pemangku kepentingan (Pemerintah, Pendamping Program, dan Masyarakat) dalam Mengimplementasikan Program tersebut dalam tinjauan Ekonomi Islam dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga

## **E. Kerangka Berfikir**

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah fakta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir, serta tingginya komitmen Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui alokasi APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun faktanya, capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan justru mengalami perlambatan 1 – 1,5% setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan besarnya alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

PKH merupakan bagian dari program perlindungan sosial (*cluster I*) dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. PKH telah diimplementasikan sejak tahun 2007 secara Nasional pada 34 Provinsi di Indonesia. PKH merupakan varian program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yaitu berupa pemberian sejumlah uang tunai yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan dalam periode tiga bulanan, selama enam tahun implementasi program. Sehingga diharapkan terjadi perubahan pada penerima PKH yang semula sangat miskin menjadi miskin, bahkan diharapkan dapat keluar dari garis kemiskinan.

Namun PKH tidak sepenuhnya sama dengan program bantuan tunai seperti BLT, BLSM atau PSKS yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Letak perbedaan PKH dengan program bantuan tunai lainnya terletak pada syarat yang mewajibkan penerima program memenuhi

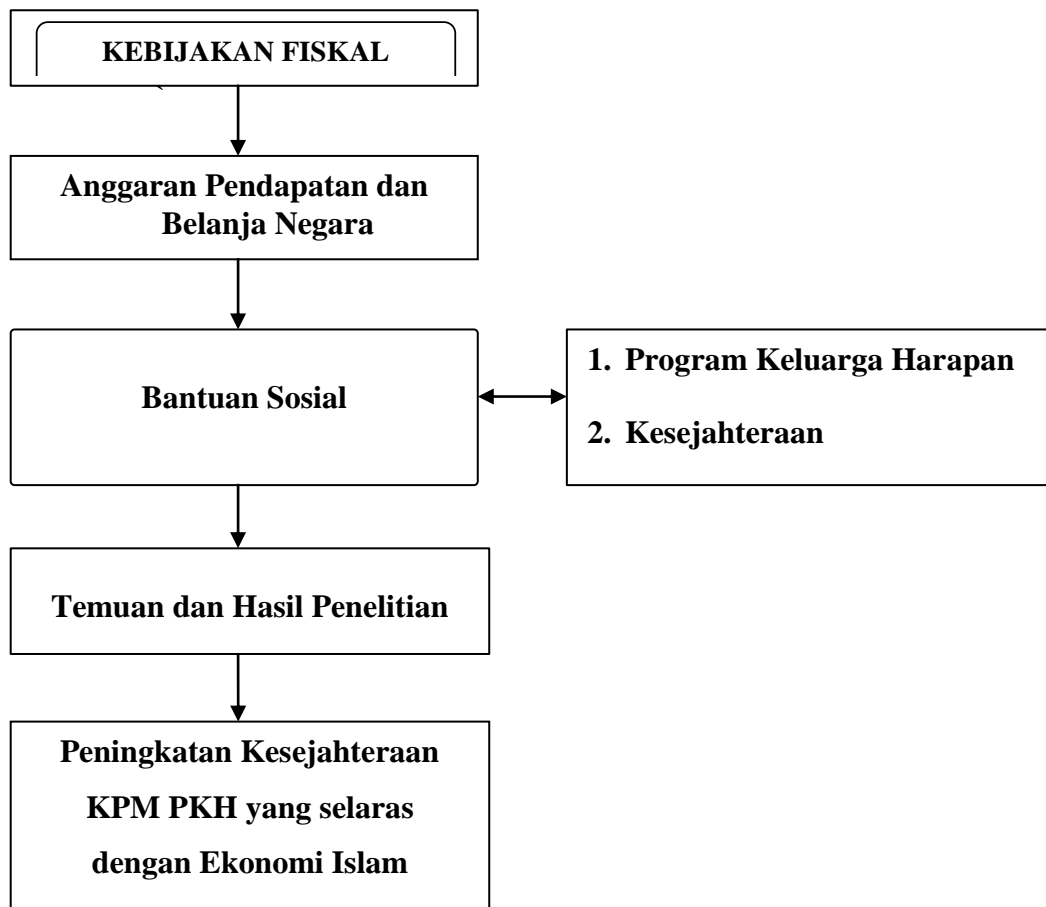
komitmen pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan PKH. Sedangkan pada program BLT, BLSM atau PSKS tidak mewajibkan adanya persyaratan tersebut. PKH juga mempunyai pemberdayaan fakir miskin yang disebut dengan KUBE PKH, dari KUBE tersebutlah merupakan letak perbedaan antara PKH dengan bantuan tunai lainnya.

Implementasi PKH di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan selama 8 tahun terhitung 2011 – 2018, pada tahun 2011 terdapat 450 Kelompok Penerima Manfaat, dan pada tahun 2015-2018 meningkat menjadi 1250 dari 17 desa yang ada di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah 'akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan 'akidah, akhlak, dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat.

Berdasarkan pada penjabaran diatas maka peneliti membuat kerangka pemikira dalam penelitian ini. Berikut ini adalah Bagan Kerangka Pemikiran yang telah peneliti rancang untuk penelitian ini :

#### **KERANGKA BERFIKIR**



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam**

Kebijakan Fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya itu kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.

##### **1. Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam**

Pada sistem sosialis sektor publik semuanya dikuasai oleh pemerintah. Pada sistem kapitalis peranan sistem publik relatif kecil tetapi sangat penting. Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilikan swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen yang bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.

Menurut Muhammad beberapa hal penting ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm. 197.

- a. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintahan muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang Muslim yang memiliki harta melebihi nilai minimum yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Quran.
- b. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu alat alternatifnya adalah menetapkan pengambilan jumlah dari uang *idle*.
- c. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
- d. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung ekonomi masyarakat Muslim yang terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam.
- e. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, dimana kesejahteraan memiliki makna yang luas daripada konsep barat, dimana kesejahteraan memiliki aspek material dan aspek spiritual.
- f. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tetapi juga pada harta bendanya untuk menjaga agama.
- g. Hak perpajakan dalam Negara Islam tidak terbatas. Beberapa orang mengatakan bahwa kebijakan perpajakan diluar apa yang

disebut *zakat*, ini adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi tertentu.

## 2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada : Prinsip *tauhid*, *rub-biyyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu : *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).<sup>12</sup>

Menurut Adiwarmarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid*, *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Menurut Adiwarmarman Karim, kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam termasuk tujuan dari kebijakan fiskal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm.37-38

<sup>13</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : III T Indonesia, 2002), hlm. 17.

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Ayat di atas menjadi dasar bagi ekonomi Islam untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin.

Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang digunakan, yaitu penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkatkeuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para



pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito dengan tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi melalui bagi hasil, semua ini akan merangsang para pengusaha karena dalam berusaha tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi.<sup>14</sup>

### **3. Mekanisme Kebijakan Fiskal**

Tujuan dan fungsi yang paling penting untuk dijadikan bahan diskusi dalam rangka mengenali karakteristik fundamental sistem keuangan dan fiskal dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut: (1) kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (2) keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan; (3) stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan; (4) penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dari empat tujuan dan fungsi tersebut dapat dikatakan sama dengan yang ada pada sistem kapitalis. Akan tetapi, sesungguhnya terdapat perbedaan komitmen kedua sistem tersebut tentang nilai spiritual, keadilan social-ekonomi, dan persaudaraan manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>15</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm. 203.

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, maka dalam bidang ekonomi harus ditekankan pada pentingnya kelayakan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan dasar, pembebasan dari semua sebab utama yang menimbulkan beban berat, dan peningkatan dalam kualitas kehidupan, secara moral maupun secara material. Hal ini juga menekankan pentingnya penciptaan suatu lingkungan ekonomi yang memungkinkan khalifatullah dapat memanfaatkan dan kemampuan fisik maupun mental mereka untuk memperkaya dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.

Dengan demikian pendayagunaan sumberdaya insani secara penuh dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan sistem yang Islami. Oleh karena itu, walaupun *full employment* dan kesejahteraan material penting dalam konteks Islam, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan kontribusi bagi *full employment* dan kelayakan ekonomi yang luas.

Konsepsi Islam yang berkaitan dengan penciptaan keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan ditempuh dengan *build in program* melalui zakat, dan sejumlah cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapat yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, ini merupakan hal penting bahwa sistem keuangan dan perbankan serta kebijaksanaan moneter dirancang semuanya pada akhirnya saling terkait ke dalam nilai-nilai Islam

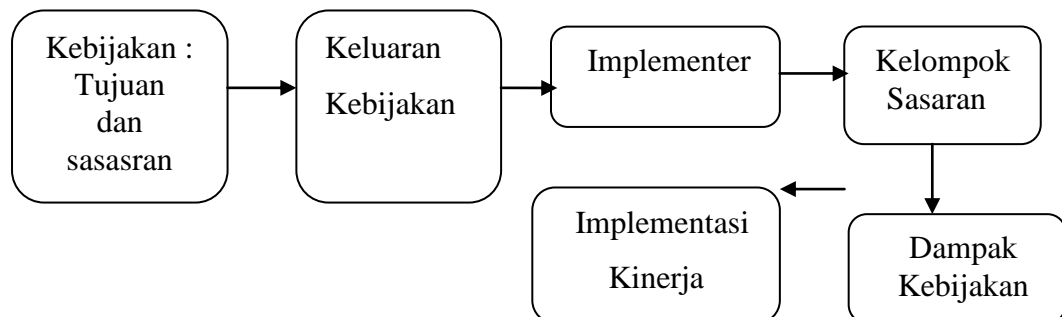
dan memberikan sumbangan secara positif untuk mengurangi ketidakadilan.

Implementasi kebijakan fiskal dengan pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh dengan *build in program* adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Berdasarkan paragraf tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan fiskal yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.<sup>16</sup> Berikut ini adalah proses implementasi kebijakan fiskal menurut pendapat Purwanto, yaitu :

---

<sup>16</sup> Erwan Agus Purwanto, dkk, *Implementasi Kebijakan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Gava Media., 2016), hlm. 72.

**Gambar 1**



## **B. Konsep Program Keluarga Harapan**

Pemerintah yang baik merupakan pemerintah yang dengan segala kebijakan serta keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi Negara dan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan kepemimpinannya diharapkan mampu menjadikan Negara tersebut menjadi lebih maju dan lebih baik lagi didalam segala bidang dengan konsep yang dimiliki.

### **1. Program Keluarga Harapan**

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.<sup>17</sup>

PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi / Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya

---

<sup>17</sup> Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013), hlm. 3.

beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin terutama keluarga dengan kemiskinan kronis.

## **2. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs). Setidaknya ada beberapa komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, tujuan tersebut sebagai upaya pencapaian target MDGs.<sup>18</sup>

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- a. Meningkatkan kondisi sosial RTSM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan RTSM
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, berat,
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM

---

<sup>18</sup>Penanggulangan Kemiskinan : Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2010, hlm. 8.

Secara umum, Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin, dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia) artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

### **3. Aturan Kebijakan dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan**

Berikut ini adalah aturan kebijakan dan dasar hukum penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan
  - 1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial
  - 3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  - 4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

---

<sup>19</sup> Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013), hlm 18.

- 5) Inpres Nomor 3 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- 6) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin sebagai peserta Program Keluarga Harapan
- b. Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
  - 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007
  - 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008
  - 3) Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi / TKPKD
  - 4) Keputusan Bupati atau Walikota Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten /Kota/TKPKD
  - 5) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan

#### **4. Penerima Program Keluarga Harapan**

Penerima Program Keluarga Harapan Adalah Rumah Tangga Miskin yang sesuai dengan Kriteria BPS dan memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan oleh program antara lain :<sup>20</sup>

- a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita,
- b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah)
- c. SD/MI (usia 7-12 tahun),
- d. Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun),
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SMA
- f. Lanjut usia diatas 70 tahun
- g. Disabilitas Berat
- h. Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan diberikan Kartu Pesserta Program Keluarga Harapan atas nama ibu atau wanita dewasa. Kartu tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## **5. Kelembagaan Program Keluarga Harapan**

### **a. Kelembagaan Tingkat Pusat**

Kelembagaan ditingkat Pusat terdiri dari Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; Tim Pengarah Pusat terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, BPS dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Tim Koordinasi Teknis Pusat yang terdiri dari pejabat aselon II atau aselon III yang ditunjuk Tim Pengarah Pusat; dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat) yang merupakan pelaksana program dibawah kendali Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

### **b. Kelembagaan Tingkat Provinsi**

Terdiri dari Tim Koordinasi PKH Provinsi, Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota, dan UPPKH Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi PKH Propinsi terdiri dari Gubernur sebagai pembina, Sekretaris Daerah ketua tim pengarah, kepala Bappeda Provinsi ketua tim teknis, kepala Dinas Sosial Provinsi sebagai sekretaris, dan anggota meliputi kepala dinas Pendidikan,



Kesehatan, kepala BPS, kepala kantor wilayah Agama, dan kepala instansi lain yang dianggap perlu.

Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum meliputi koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH, dan koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/kota terkait pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota meliputi Bupati sebagai Pembina, Sekertaris Daerah sebagai ketua tim pengarah, Bappeda sebagai ketua tim teknis, Kepala Dinas Sosial sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri dari kepala dinas Pendidikan, Kesehatan, BPS, Koordinator UPPKH Kabupaten, Camat Lokasi PKH serta instansi lain yang dianggap perlu.

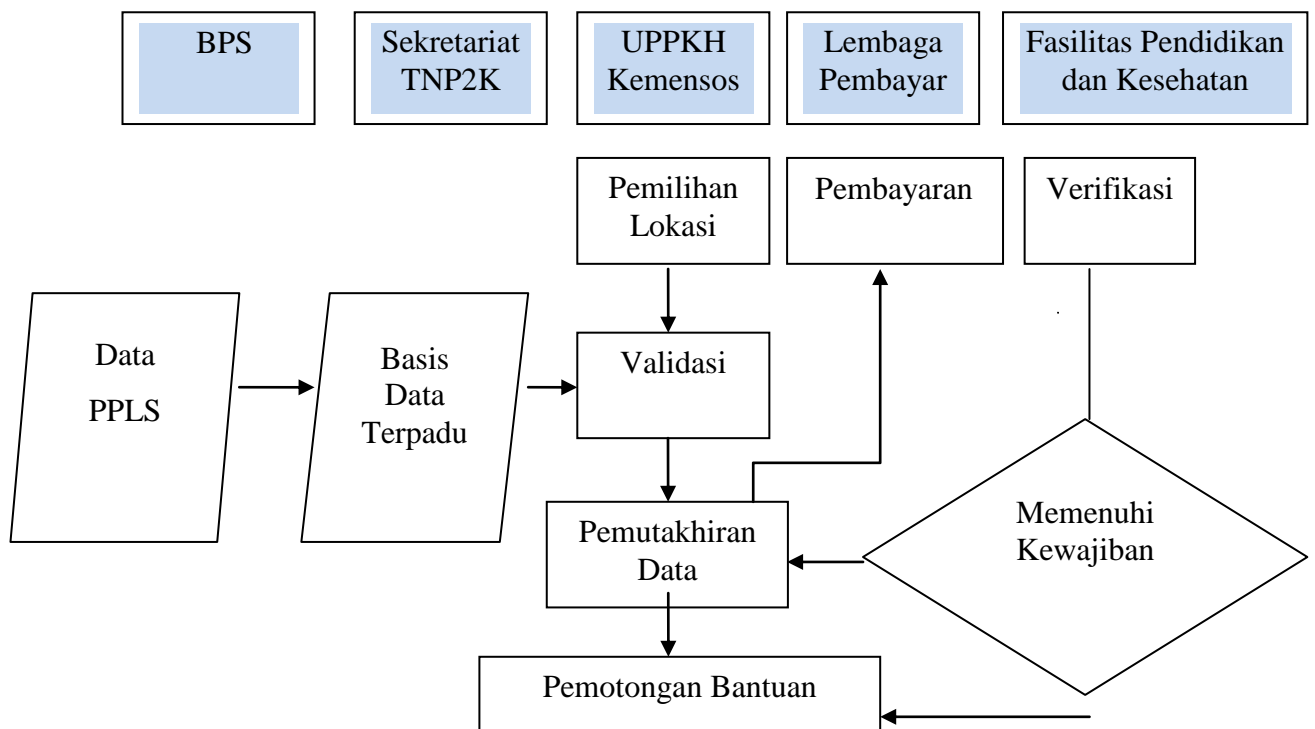
Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta tenaga Operator yang direkrut oleh Kementrian Sosial dan ditempatkan di secretariat UPPKH Kabupaten/Kota. Sedangkan UPPKH Kecamatan merupakan pelaksana PKH pada tingkatan terbawah pada pelaksana PKH. Keanggotaan UPPKH Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala UPTD Pendidikan, Kepala UPTD Kesehatan, BPS, Pendamping PKH dan kepala-kepala Kampung.

## 6. Kegiatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu lokasi PKH samapi dengan berakhirnya program PKH.

Berdasarkan panduan umum kegiatan PKH meliputi sebagai berikut :

- b. Penetapan Sasaran (*Targetting*)
- c. Pertemuan awal dan validasi
- d. Pembentukan Kelompok Kelompok Penerima Manfaat
- e. Penyaluran Bantuan
- f. Verifikasi Komitmen
- g. Pemutakhiran Data Kelompok Penerima manfaat.



Untuk mendukung terlaksananya siklus tersebut, maka dilakukan kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Koordinasi dan sosialisasi

- b. Rekrutment dan Pelatihan
- c. Rapat Koordinasi tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten Kota
- d. Bimbingan teknis pendamping dan operator
- e. Pengaduan masyarakat
- f. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

## **7. Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan**

KUBE merupakan salah satu program kementerian Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP KUBE sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan strategi penguatan kelompok pemberian bantuan stimulan usaha dan pendampingan yang menggunakan pendekatan pekerjaan sosial.<sup>21</sup> KUBE dilaksanakan oleh Direktorat Penanggulangan kemiskinan Perkotaan dan Penanggulangan Perdesaan, serta diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan peserta PKH yang masih dalam masa transisi (status KSM Keluarga Sangat Miskin). KUBE sebagai skema penanggulangan kemiskinan yang strategis mendorong perlunya telanhan yang berfokus pada indikator keberhasilan KUBE terhadap kemandirian keluarga fakir miskin penerima UEP, Aspek yang menjadi ukuran keberhasilan KUBE dan bagaimana performa kerja pendamping.

---

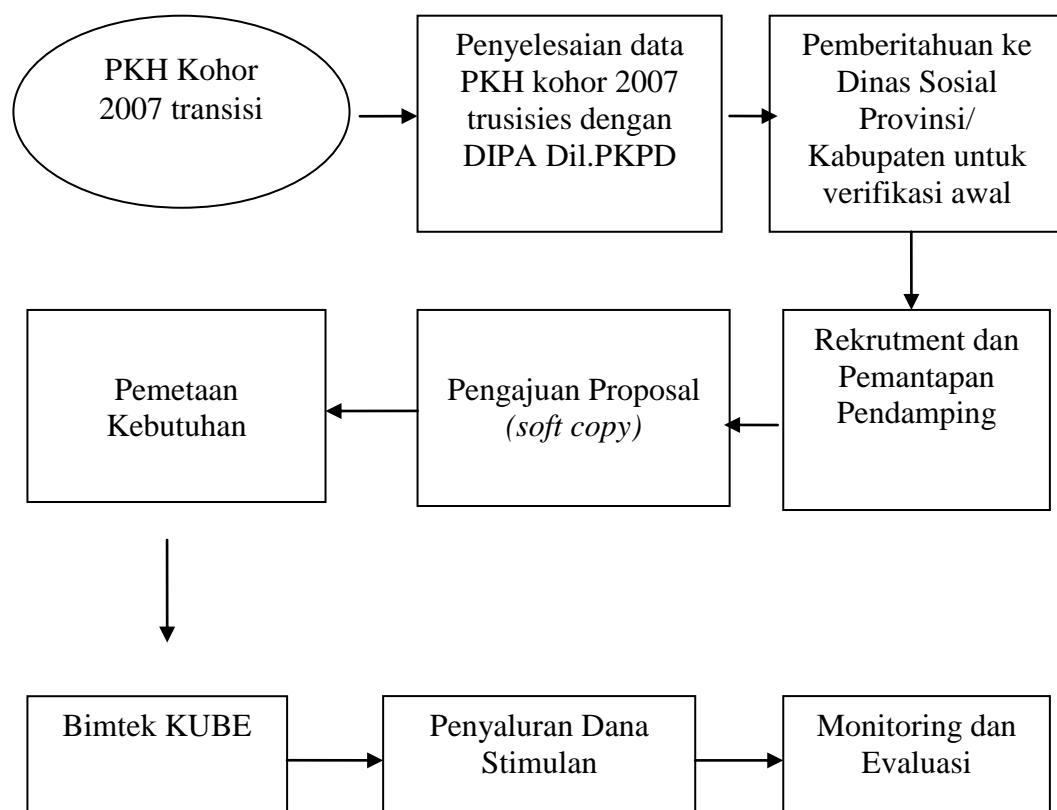
<sup>21</sup> Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013), hlm 23.

a. Skema Penetapan Penerimaan Bantuan Kube PKH

Penerima bantuan sosial KUBE PKH difokuskan pada penerimis PKH kohor 2007 transisi berdasarkan skema penetapan schagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Skema Penetapan Penerima bantuan Sosial KUBE PKH**



Sumber : Kementerian Sosial RI ([www.Kemosos.go.id](http://www.Kemosos.go.id))

b. Tujuan KUBE Program PKH

Pelaksanaan KUBE PKH bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga melalui pemberian bantuan UEP KUBE PKH,
- 2) Meningkatkan keterampilan anggota dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan UEP KUBE PKH,

- 3) Meningkatkan keterampilan anggota dalam pengelolaan organisasi (kepengurusan) KUBE PKH,
- 4) Meningkatkan hubungan dan interaksi sosial diantara anggota KUBE PKH dan lingkungannya,
- 5) Meningkatkan kepedulian sosial anggota KUBE PKH untuk terlibat dalam penanganan masalah sosial,
- 6) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE PKH dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dan ekonomi dasar, pasar, perbankan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya melalui penguatan kapasitas.

#### h. Mekanisme Pelaksanaan KUBE

- 1) Seleksi Penerima Bantuan
- 2) Pengajuan Proposal
- 3) Verifikasi Proposal dan Penyaluran Dana
- 4) Pembinaan Kelompok
- 5) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

### C. Pemberdayaan Masyarakat

Membedayakan masyarakat merupakan salah satu dari bagian tugas dan fungsi pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan publik yang dimiliki oleh pemerintah agar dapat membantu memberdayakan kehidupan masyarakat.

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang artinya kekuatan.<sup>22</sup> Jadi pemberdayaan adalah penguatan yaitu penguatan yang lemah. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah penguatan masyarakat yang

---

<sup>22</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2004), hlm. 38.

lemah. Masyarakat yang lemah bukan berarti kurus atau sakit, tetapi lemah secara politik, lemah secara ekonomi dan lemah secara sosial budaya. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah penguatan masyarakat dibidang politik, ekonomi dan sosial mental serta mengandung adanya penguatan moral, pengembangan aspek pengetahuan sikap dan keterampilan masyarakat.

Hal yang paling inti dalam pemberdayaan (*empowering*) adalah peningkatan kesadaran (*conciosness*). Istilah penyadaran diartikan sebagai belajar memahami kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut. Dalam proses penyadaran masyarakat tidak mungkin dilakukan secara sendiri sendiri atau melalui orang perorang. Dengan kata lain, komunitas yang didampingi harus disatukan terlebih dulu dalam suatu wadah organisasi.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari proses operasionalnya pemberdayaan memiliki dua kecenderungan antara lain: *pertama*, kecenderungan primer, kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan(power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

Tahap-tahap pemberdayaan sebagai proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun sebagai

---

<sup>23</sup> Yakob Napu dkk, *Pengembangan Masyarakat, ). Cet. Ke-1*, (Gorontalo: Andraggika press, 2009), hlm. 87-88.

proses pemberdayaan mempunyai tahapan: Penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

- a. Tahap pertama adalah penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat lebih sejahtera, Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan ini dapat yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku. transformasi pengetahuan.
- b. Tahap kedua adalah kecakapan keterampilan. Dalam tahap ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan seperti melalui pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- c. Tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahap peningkatan kemampuan kecakapan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.<sup>24</sup>

Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

---

<sup>24</sup> Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. (Yogyakarta: Samudera Baru, 2012), hlm. 33-34.

- 2) Tahap assessment, Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- 3) Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap formulasi rencana aksi pada tahap ini fasilitator membantu masing masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan kepihak penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng data di lapangan.
- 6) Tahap Evaluasi. Pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- 7) Tahap Terminasi. tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat sasaran sudah bisa mandiri, bukan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuanya.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan pemberdayaan sebagai usaha untuk perbaikan perekonomian masyarakat miskin, terdapat beberapa usaha atau strategi yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Mendorong secara sistematis proses penyadaran diri secara individual dan kolektif Dalam kepemimpinan demokratis

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 35-37.



- b. Mengembangkan organisasi dan kelompok sosial primer sebagai media saling belajar dan instrument perubahan perilaku secara aman.
- c. Pendidikan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mengembangkan sikap dan perilaku budaya surplus,
- d. Mendorong kegiatan usaha produktif dan mobilisasi potensi sumberdaya untuk pendapatan keluarga.
- e. Memfasilitasi dan menjembatani akses pada sumber pelayanan pengembangan
- f. Penyediaan bantuan teknik dan pendampingan sesuai kebutuhan.
- g. Memfasiliasi kerjasama antar kelompok dan integrasi dalam kehidupan sosial.

## **2. Pemberdayaan Dalam Ekonomi Islam**

Menurut Mubyarto, pemberdayaan adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi yang meningkat tapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.<sup>26</sup>

Menurut Ginanjar Kartasasmita memberdayakan masyarakat adalah upaya-upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain

---

<sup>26</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta Aditya Media, 1996, hlm. 37

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>27</sup>

Strategi pemberdayaan masyarakat yaitu :<sup>28</sup>

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan iklim yang mendukung agar potensi berkembang. Iklim yang ada dapat mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan sumberdaya yang dimiliki agar dapat berupaya mengembangkannya.
- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang mereka miliki. Peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Sistem ini diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktek - praktek eksploitasi.

Upaya sering diartikan sebagai usaha ikhtiar untuk mencapai suatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan. Menurut Ginanjar Kartasasmita pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui tiga jalan, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam membangun daya yaitu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang (*Empowering*). Penguatan ini melalui langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai kegiatan, berbagai masukan dan berbagai rangka peluang membuat mereka menjadi berdaya. Dalam memperkuat potensi ekonomi rakyat ini. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf-taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta terbentuknya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi.
- c. Memberdayakan mengandung arti melindungi dan membela kepentingan yang lemah agar tidak bertambah lemah. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah adanya upaya - upaya nyata untuk

---

<sup>27</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : PT. Pustaka Cresindo, 1996, hlm. 144

<sup>28</sup> Adi Fahrudin, *Ph.D, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan kapasitas Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2000 ), hlm. 96.

<sup>29</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Op.cit*, hlm. 159-160.

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat jika melakukan langkah-langkah dalam pemberdayaan ekonomi yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi. Seperti operasi, usaha kecil, petani dan kelompok mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan yang kontnu terhadap pelaku pelaku tersebut mulai dengan pendampingan.
- c. Melakukan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodic antar instansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap pemodalan, SDM, pasar, informasi pasar maupun penerapan teknologi

Dalam pengembangan ekonomi ada Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal yang amat penting ketika mereka memasuki dunia usaha. Program pembinaan berkelanjutan itu dilakukan melalui tahapan kegiatan yaitu:

---

<sup>30</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan* (Yogyakarta : Adicipta, 2003), hlm. 14.

- a. Pelatihan usaha, melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada di dalamnya. Dan meningkatkan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk dan perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan jejaringan kemitraan.<sup>31</sup>
- b. Pemegangan, pemegangan dalam bidang usaha ini diartikan sebagai secara realitas usaha intens dan empiric. pengenalan terhadap Pembangunan ini sangat perlu karena suasana dan realitas usaha dunia mempunyai karakteristik yang khas, yang berbeda dengan pendidikan atau kegiatan diluar usaha.
- c. Penyusunan proposal untuk melalui kegiatan usaha yang sering kali dilupakan adalah penyusunan proposan sebagai acuan dan target proposal ini juga perkembangan usaha. Dan melalui penyusunan memungkinkan untuk membuka jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.
- d. Permodalan, permodalan dalam bentuk uang, merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha,tetapi bukan yang terpenting Untuk mendapatkan kepentingan yang stabil.perlu mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan baik

---

<sup>31</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta, CV. Abdi, 2012). hlm. 225.

perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

- e. Jaringan bisnis dengan melalui berbagai tahapan yang konsisten sistimatis dan berkelanjutan, maka upaya melahirkan pengusaha sejati hanya menunggu waktu saja. Disamping itu, Mardikanto menambahkan satu hal lagi yang menyangkut pentingnya perbaikan aksesibilitas petani dan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan petani yang lain, baik terhadap inovasi, input usaha petani (sasaran produksi, alat dan mesin petani ), pasar dan jaminan harga, serta pengambilan keputusan politik.<sup>32</sup>

Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang secara bersama-sama dengan penjabat-penjabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>33</sup> Rawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Ed. Ke-VI, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 308.

## **D. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dalam sebuah Negara sangat mempengaruhi

### **1. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.<sup>34</sup> Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

### **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera

---

<sup>34</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 146.

<sup>35</sup> Anwar Abbas, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008), hlm.126.

atau tidak.<sup>36</sup> Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut para ahli dan beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Kolle

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :<sup>37</sup>

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Badrudin, *Op.Cit*, hlm. 148.

<sup>37</sup> Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 44.

<sup>38</sup> Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputan Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, *Laporan Akhir "Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (keluarga pra sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera 1/KS1)*, ( Jakarta: BAPPENAS, 2010), hlm. 10.

c. Badan Pusat Statistik

Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin yaitu seperti :

- 1) luas bangunan per anggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 meter persegi.
- 2) Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
- 3) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- 4) Fasilitas MCK belum tersedia.
- 5) Sumber air minum bukan air minum bersih.
- 6) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- 7) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
- 8) Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
- 9) Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
- 10) Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
- 11) Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas atau poliklinik.
- 12) Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
- 13) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah
- 14) Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.<sup>39</sup>

d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

---

<sup>39</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada Kamis, 1 Agustus 2018.



BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:<sup>40</sup>

a. Tahap *Prasejahtera*

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana.

b. Tahap Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara opsional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing
- b) Paling kurang satu kali dalam seminggu makan daging/ikan/telur
- c) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun
- d) Luas lantai rumah 8M untuk setiap penghuni rumah

---

<sup>40</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: [www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/](http://www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/), diakses pada Jum'at 3 Agustus 2018.

- e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat
- f) Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
- g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
- h) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

c. Tahap *Sejahtera II*

Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator berikut:

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang
- c. Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi
- d. Mengikuti kegiatan masyarakat
- e. Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah

d. Tahap *Sejahtera III*

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan materil secara teratur
- b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

e. Tahap *Sejahtera III Plus*

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari keluarga para sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.

### **3. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam**

#### **a. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam**

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>41</sup>

Istilah *falah* berasal dari bahasa arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>42</sup> *Falah*, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material,

---

<sup>41</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 595.

<sup>42</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), hlm. 2.

yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>43</sup>

Komitemen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatkan untuk mengaktualisasikan “*maqashid syari’ah*” diantaranya adalah :<sup>44</sup>

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok.
- 2) Sumberdaya pendapatan yang terhormat.
- 3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syari’ah Islam sendiri yaitu *maslahat al-’ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimumkebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.<sup>45</sup>

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi

---

<sup>43</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2010) hlm. 62.

<sup>44</sup> Adiwarman A, Karim, *Op.,Cit.* hlm 164.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an Surat Hud ayat 6 yang berbunyi :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٦﴾

Artinya : “dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ عَذَابٍ ۖ أَفَلَا مَرَدٌّ لَهُ وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۝١١

Artinya : “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan usaha serta campur tangan pihak lain untuk memfasilitasinya. Masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk

memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”,

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah bagi masyarakat adalah :<sup>46</sup>

1) Kebutuhan Primer (*Ad-daruriyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan dalam menjalani hidup didunia dan akhirat.

2) Kebutuhan Sekunder (*Al-hajjiyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

3) Kebutuhan Tersier (*At-tahsiniyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat Kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, jika kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi maka boleh memenuhi kebutuhan tersier.

4. Kebutuhan Komplementer (*Al-Kamiliyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan barang pelengkap adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan

---

<sup>46</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan barang pelengkap.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian yang berkaitan. Sebagaimana deskripsi dalam latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu :

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Lailia Priyantiningtyas. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengevaluasi bagaimana sebenarnya kerja kinerja pengawalan Program Keluarga Harapan berkontribusi berhasil mencapai program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pada tahun 2013. Paradigma kualitatif dan penelitian deskriptif digunakan untuk memproses data primer dan sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Program Keluarga Harapan diadakan di Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 telah berkontribusi terhadap masyarakat program pemberdayaan. Pencapaian PKH ini adalah meningkatnya jumlah kerja ibu rumah tangga sebagai penjual makanan ringan atau membuat jasa katering. Efek upaya ini terhadap kondisi

ekonomi keluarga. Implementasi Program Keluarga Harapan sudah membuat masyarakat mengubah pola pikir mereka untuk membuat perbaikan untuk hidup mereka.<sup>47</sup>

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Devina Melina Wati, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan beserta Kelompok Usaha Bersama terhadap minat berwira usaha keluarga miskin di Kecamatan Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terdaftar sebagai peserta PKH dan KUBe di Kecamatan Wonogiri Tahun 2016. Penarikan sampel menggunakan teknik *cluster sampling*. Untuk proses pengumpulan data digunakan metode angket dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bantuan tunai PKH tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. (2) Program KUBe berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha (3) bantuan tunai PKH dan KUBe secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha.<sup>48</sup>

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Dedi Utomo Dkk penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan PKH dalam upaya mengentas kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan

---

<sup>47</sup> Laila Priyaningtyas, *Evaluasi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Situbondo Tahun 2013*, Vol.14, No.1, 2014, hlm. 90-105.

<sup>48</sup> Devina Melina Wati, *Pengaruh Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Terhadap Minat Berwirausaha Keluarga Sangat Miskin Di Kecamatan Wonogiri Tahun 2016*.



kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kecamatan Purwoasri ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.<sup>49</sup>

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Stevianus Laoh, Dkk. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan apakah penerima bantuan PKH ini sudah tepat sasaran, dan bagaimana komitmen atau kewajiban yang dilakukan oleh peserta PKH, juga apakah bantuan dana yang diterima oleh peserta PKH digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan atau untuk kebutuhan lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Juni 2016 mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini

---

<sup>49</sup> Dedi Utomo, Dkk, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)*, 2014, Vol. 2, No. 1, hlm. 29-34

menggunakan data primer dan data sekunder, dengan jumlah responden sebanyak 8 responden dari populasi peserta PKH. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta PKH di Kelurahan Malalayang Satu hampir tepat sasaran berdasarkan 14 kriteria BPS dan Kementerian Sosial, tetapi peserta PKH kurang menjalankan komitmen berdasarkan PKH, juga bantuan dana yang diterima oleh peserta PKH digunakan untuk kebutuhan lain selain pendidikan dan kesehatan.<sup>50</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini terletak pada tempat penelitian dan pembahasan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya akan peneliti jadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Jika penelitian terdahulu membahas bagaimana pengaruh program keluarga harapan terhadap minat usaha, evaluasi proses bantuan PKH dan bagaimana bantuan PKH meningkatkan kualitas hidup. Maka pada kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan pembahasan implementasi Program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam dengan tempat penelitian di Kecamatan Ketapang Lampung Selatan.

---

<sup>50</sup> Stevianus Laoh, Dkk, *Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado*, 2016, Vol. 12 No. 2A, hlm. 315 - 330

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahab Sholihin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Adi Fahrudin, *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2000.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : III T Indonesia, 2002.
- Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudera Baru, 2012.
- Dedi Utomo, Dkk, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)*, 2014, Vol. 2, No. 1, hlm. 29-34.
- Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Devina Melina Wati, *Pengaruh Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Terhadap Minat Berwirausaha Keluarga Sangat Miskin Di Kecamatan Wonogiri Tahun 2016*.
- Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputan Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, *Laporan Akhir "Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (keluarga pra sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera 1/KS1)*, Jakarta: BAPPENAS, 2010.
- Dyah Ayu Virgoreta dkk, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No 12, hlm. 1-6.
- Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Ginanjjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cresindo, 1996.

- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2004.
- Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Kemeterian Sosial, 2013.
- Indah Kusuma Ningrum, *Memahami Penelitian Kualitatif secara Detail*, Bandung, PT. Citra Adzkia, 2012.
- Laila Priyaningtyas, *Evaluasi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Situbondo Tahun 2013*, Vol.14, No.1, 2014, hlm. 90-105.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta Aditya Media: 1996.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Rawan dan M.Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan, Ed. Ke-VI, Cet. Ke-2* Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV, Surabaya: Bina Ilmu.

Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Stevianus Laoh, Dkk, *Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado*, 2016, Vol. 12 No. 2A, hlm. 315 - 330.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-23, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syaikh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz 'Ammah)*, diterjemahkan Oleh Muhammad Bagir, *Tafsir Juz 'Ammah Muhammad Abduh*, .Cet.V; Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta, CV. Abdi, 2012.

Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.

Yakob Napu dkk, *Pengembangan Masyarakat, Cet. Ke-1*, Gorontalo: Andraggika press, 2009.

Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Yogyakarta*: Adicipta, 2003.